

Dialog

Vol. 36, No. 1, Agustus 2013

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM

Prof. Dr. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Badan Litbang dan Diklat
Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Kepala Bagian Perencanaan
Ir. Hj. Sunarini, M.Kom.

SEKRETARIS REDAKSI
Taufik Budi Soetrisno, S.IP

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)
Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. (Tafsir)
Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)
Prof. Dr. M. Atho Mudzhar (Hukum Islam)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BORD)
Prof. Dr. Abdurrahman Mas'ud (Sejarah dan Kebudayaan Islam)
Prof. Dr. Dedy Djubaedy (Kehidupan Keagamaan)
Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)
Drs. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih al-Qur'an)
Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

REDAKTUR PELAKSANA
Abas Jauhari, M.Sos

ALAMAT REDAKSI
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380

WEBSITE:
www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

PENGANTAR REDAKSI

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 36, No.1, Agustus 2013

AHMAD DUMYATHI BASHORI

Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolok Ukur Moderasi dan Pemahaman Terhadap Nash: 1-18

A. ZAENURROSYID

Wakaf Tunai (Studi Analisis Pengelolaan Wakaf di PPPA Daarul Quran Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004): 19-30

ALI RAMA DAN MAKHLANI

Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah: 31-46

ALI ROMDHONI, MA

Islam Berbungkus Kearifan Lokal (Local Wisdom): Menemukan Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Seni Ketoprak di Pati Jawa Tengah: 47-58

AHMAD ALI MD

Argumen Formalisasi Hukum Ekonomi Syariah: 59-70

QOWAID

Gejala Intoleransi Beragama di Kalangan Peserta Didik dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendidikan Agama Islam di Sekolah: 71-86

SUPRAPTO

Model Penyelenggaraan Pendidikan Agama Alternatif: SD Islam Terpadu Nurul Fikri Depok Jawa Barat: 87-98

NIHAYATUL WAFIROH

Muslims' Views of Hindu Religious Life: (A Case Study of Banyuwangi Muslims in Bali): 99-106

AAM S. RUSYDIANA & ABRISTA DEVI

Mencari Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: 107-120

BOOK REVIEW

ABDUL AZIZ

Non-State: Aspek yang Terlupakan dalam Teori Gerakan Sosial: 121-138

GEJALA INTOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN PESERTA DIDIK DAN UPAYA ENANGGULANGANNYA MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH

OLEH: QOWAID*)

ABSTRAK

Toleransi beragama merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk menumbuhkembangkan sikap saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Peserta didik memiliki posisi penting dan potensi besar dalam menciptakan toleransi beragama. Oleh karena itu, timbul pertanyaan seperti apakah tingkat toleransi peserta didik sekolah lanjutan tingkat atas saat ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat toleransi peserta didik sekolah lanjutan tingkat atas di Pulau Jawa dan Sulawesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sikap keberagaman peserta didik muslim sekolah lanjutan tingkat atas adalah moderat dan cukup toleran, meski juga terlihat munculnya kecenderungan atau gejala sikap intoleran. Intoleransi tersebut berkorelasi dengan faktor internal dan eksternal kegidupan peserta didik. Oleh karena itu diperlukan upaya agar sikap toleran peserta didik semakin meningkat, dan sikap intoleran semakin mengecil, antara lain melalui Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Di antaranya adalah melalui penguatan isi/materi pelajaran yang menekankan faham keagamaan yang moderat, peningkatan profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam, media pembelajarannya, dan penilaian hasil belajar peserta didik, peningkatan motivasi dan komitmen untuk menjadi guru yang profesional.

KATA KUNCI:

Toleransi beragama; peserta didik; profesionalitas guru, Pendidikan Agama Islam.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Kamis sore atau Jumat, 31 Mei 2013 WIB menerima penghargaan *World Statesman Award* atau Anugerah Negarawan Dunia, dari *Appeal of Conscience Foundation (ACF)* di New York Amerika Serikat. Penghargaan tersebut diberikan oleh Henry A Kissinger (mantan Menteri Luar Negeri AS) dan Rabi Arthur Schneier (Pendidiri ACF). Organisasi ini mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antarkepercayaan. Presiden menerima penghargaan ini

karena keberhasilan memelihara kedamaian dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dalam kata sambutannya, Kissinger dan Schneier (Kompas, 2013: 1) masing-masing mengapresiasi Presiden Yudhoyono atas capaian memajukan kehidupan demokrasi, ikut menciptakan tatanan dunia internasional yang lebih damai, mendorong penghormatan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan hubungan antar-peradaban. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan adanya kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik, termasuk di dalamnya adalah toleransi kehidupan beragama.

Walaupun telah menerima penghargaan, memang diakui bahwa kondisi kerukunan beragama di Indonesia belum ideal. Masih terdapat kantong-kantong intoleransi, kerawa-

*) Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta pusat

nan konflik komunal, dan elemen radikal, yang harus terus diperbaiki. Penghargaan tersebut harus diterima sebagai bagian dari upaya melakukan introspeksi dan perbaikan terhadap banyak hal yang dirasakan belum baik. Termasuk di dalamnya adalah masalah intoleransi beragama atau dalam aspek yang lebih luas, keharmonisan atau kerukunan hidup beragama.

Masa depan toleransi di Indonesia tampaknya masih jauh dari kesempurnaan. (Kholid, 2013: 20) Mengutip catatan Setara Institute, selama tahun 2012 tercatat 264 peristiwa dan 371 tindakan pelanggaran kebebasan beragama. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2011 yang tercatat 244 peristiwa dan 299 tindakan.

Bahkan lebih dari itu, radikalisme beragama, diduga telah masuk di kalangan peserta didik, dan diduga telah mengarah pada gerakan radikalisme melampaui tujuan pendidikan pada sekolah pada umumnya, dan tujuan pendidikan agama pada khususnya. Dengan judul "Radikalisme Islam Menyusup ke SMU" sebuah media di Jakarta menulis bahwa beberapa hasil penelitian menemukan fakta bahwa gerakan dan radikalisme Islam telah lama menyusup ke sekolah umum. (Seputar Indonesia, 2009)

Sementara itu, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk; baik dari sisi budaya, etnis, bahasa, maupun agama. Dari sisi agama, di negara ini hidup berbagai agama besar dunia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Selain itu, tumbuh dan berkembang pula berbagai aliran dan kepercayaan lokal yang jumlahnya tidak kalah banyak. Oleh karena itu, keberagaman yang tidak menjunjung nilai kemajemukan tentu tidak sesuai dengan realitas keindonesiaan.

Kemajemukan agama tersebut pada satu sisi menjadi modal kekayaan budaya dan memberikan keuntungan bagi inspirasi yang sangat kaya bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Namun, pada sisi lain, kemajemukan bisa pula berpotensi mencuatkan konflik sosial antarumat beragama yang bisa mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama bila kemajemukan tersebut tidak disikapi dan dikelola dengan baik. (Hisyam, Muhammad, 2006:1)

Peserta didik menempati posisi penting dan potensi besar dalam percaturan kehidupan di masyarakat. Salah satunya adalah ikut berpartisipasi dalam menciptakan kerukunan hidup

beragama di Indonesia. Dengan demikian perlu diketahui, antara lain, tingkat toleransi peserta didik terhadap kehidupan beragama di Indonesia, agar mereka dapat berpartisipasi secara positif. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui penelitian.

Oleh karena itu, dipandang penting melakukan penelitian dan pengkajian secara lebih menyeluruh dan lebih luas baik dalam lingkup kewilayahan maupun jenis pendidikan di kalangan peserta didik. Maka, penulis, melalui Tim Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan melakukan penelitian tentang toleransi beragama peserta didik di sekolah khususnya, dan perilaku keberagaman peserta didik di sekolah umumnya. Responden adalah peserta didik yang sedang belajar di sekolah menengah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang terdiri dari peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) di Pulau Jawa dan Sulawesi.

Masalahnya adalah seperti apakah tingkat toleransi peserta didik sekolah menengah tingkat atas (SLTA)? Faktor-faktor apa sajakah yang diperkirakan mempengaruhinya? Bagaimanakah upaya penanggulangannya, khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam di Sekolah?

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat toleransi peserta didik sekolah menengah tingkat atas (SLTA), faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta upaya penanggulangannya, khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam di Sekolah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini dilakukan dengan survei. Target populasi yang menjadi sasaran penelitian adalah seluruh peserta didik sekolah SLTA (SMA, SMK dan MA) di seluruh propinsi di Pulau Jawa dan Sulawesi.

Pemilihan responden dilakukan secara acak bertingkat (*stratified random sampling*) dengan sasaran 12 propinsi seluruh pulau Jawa dan Sulawesi, yaitu dengan rincian sejumlah 133 kabupaten/kota terpilih (terdiri dari 103 Kabupaten dan 30 Kota), sejumlah 201 sekolah terpilih (SMA, SMK dan MA), dan terdiri dari sejumlah 804 peserta didik terpilih secara acak proporsional. Besaran toleransi kesalahan *margin of error* (MoE)

sebesar 3,45% pada tingkat kepercayaan 95% dengan proporsi gender sebesar 50:50.

Selanjutnya untuk dapat memperoleh data penelitian yang terpercaya, dilakukan pengacakan secara bertingkat dimulai dari tingkat kabupaten/kota, sekolah/madrasah, hingga peserta didik secara proporsional. Prosedur pengacakan di tingkat kabupaten/kota dan sekolah/MA dilakukan secara terpusat, sementara pengacakan di tingkat peserta didik dilakukan oleh tenaga pengumpul data (TPD) di lapangan sesuai data base/absensi peserta didik di masing-masing sekolah/madrasah terpilih secara acak.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih sebelumnya. Guna menjaga validitas data, dilakukan *quality control* hasil wawancara secara random sebesar 10% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (*spot check*). Diharapkan melalui *quality control* dimaksud tidak ditemukan kesalahan berarti. Pelaksanaan survei dilakukan secara serentak di seluruh sekolah/madrasah terpilih pada tanggal 18 Oktober-02 November 2011.

Kerangka Konseptual

Toleransi (*tolerance*) diartikan oleh Hornby dkk. (Hornby, 1996: 1063) sebagai "*quality of tolerating opinions, beliefs, customs, etc different from one's own*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berarti bersikap toleran, sedangkan toleran berarti bersikap atau bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) yang berbeda dan/atau bertentangan dengan pendirian sendiri. (Tim Penyusun Bahasa Indonesia, 2008: 955)

Toleransi adalah pengakuan terhadap orang lain dan kelompok lain dalam keberlainan. Toleransi merupakan penerimaan terhadap kenyataan bahwa kita berbeda, bahwa di sekitar kita hidup orang-orang dengan aneka kepercayaan dan agama berlainan. Karena itu kesetaraan merupakan kata kunci toleransi. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam memandang orang yang berbeda. Toleransi lebih dari sekedar hidup rukun, tetapi juga menjalin komunikasi secara terbuka untuk saling mengenal satu sama lain dengan perasaan saling menghormati dan menghargai. (Soemanto dkk.,

2008: 33)

Toleransi merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk menumbuhkembangkan sikap saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada, serta menjadi *entry point* bagi terwujudnya suasana dialog dan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat. Agar tidak terjadi konflik antarumat beragama, toleransi harus menjadi kesadaran kolektif seluruh kelompok masyarakat, dari tingkat anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua, baik mahasiswa, pegawai, birokrat, bahkan peserta didik yang masih belajar di bangku sekolah.

Dengan demikian, toleransi adalah nilai-nilai, sikap, kesediaan dan keterlibatan seseorang dalam mendukung suatu keadaan yang memberikan ruang bagi adanya pengakuan perbedaan (*the others*) dan khususnya untuk terciptanya kerukunan. Dalam kehidupan umat beragama, maka toleransi dilihat sebagai menjaga kerukunan antar dan intern umat beragama. Intoleransi adalah adanya karakteristik yang berlawanan dengan karakteristik toleransi sebagaimana disebut di muka.

Setara Institute (Hasani dkk., 2011:14 -16) membedakan antara intoleransi pasif dengan intoleransi aktif. Intoleransi pasif hanyalah pada tingkat pada tingkat gagasan dan puritanisme, sedangkan intoleransi aktif sudah diterjemahkan menjadi tindakan dan aksi. Jika intoleransi dapat dimaknai sebagai kekerasan dalam bentuk pasif atau kekerasan yang paling rendah, maka eskalasi krisis akan sangat menentukan perubahan sifat pasif menjadi lebih lunak. Intoleransi pasif sebagai terminologi untuk menunjuk kombinasi gagasan fundamental, eksklusivisme dan intoleransi yang tidak memanifestasi menjadi kekerasan. Kebalikannya, intoleransi aktif adalah *grade* untuk menunjuk gagasan dan cara pandang intoleransi menjadi kekerasan.

Gejala intoleransi beragama bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Kondisi lingkungan diyakini mempengaruhinya. Banyak aspek atau faktor dapat mempengaruhinya, baik politik, sosial, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya yang tergolong sebagai faktor eksternal. Sementara itu, dari segi internal, kondisi keyakinan keagamaan seseorang juga dapat mempengaruhinya. Dengan demikian, intoleransi merupakan produk dari beberapa faktor yang saling terkait.

Faktor pemicu kelahiran intoleransi dapat disederhanakan ke dalam dua aspek, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimaksudkan sebagai faktor yang berasal dari paham keagamaan yang berupa kondisi emosi dan pendirian teologi dalam wujud keyakinan yang didasarkan atas interpretasi ajaran agama. Faktor eksternal dimaksudkan sebagai faktor yang koheren dengan pendirian teori-teori sosial dan psikologi sosial dengan menegaskan bahwa intoleransi dipicu oleh serangkaian variabel deprivasi. Deprivasi adalah kondisi kejiwaan yang berupa perasaan negatif, terabaikan, tertekan terhadap realitas yang dialami.

Hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya merupakan suatu jalinan *transactional interdependency* atau terjadi saling ketergantungan satu sama lain. Manusia mempengaruhi lingkungannya, untuk selanjutnya lingkungan akan mempengaruhi manusia, demikian pula terjadi sebaliknya. Sebagai makhluk sosial yang tunduk pada hukum-hukum sosial, setiap individu manusia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya dan politik. Menurut John Nimpuno, sebagaimana dikutip oleh Djumiko (Djumiko 3 – 4), 2010:, lingkungan dapat menjadi stimulus atau rangsangan terhadap proses kejiwaan yang menghasilkan pola perilaku tertentu. Perilaku adalah ungkapan kebutuhan internal di dalam diri manusia yang berada di lingkungan sosial fisik tertentu yang merupakan unsur internal. Perilaku di balik sikap, tanggapan dan tindakan manusia sangat ditentukan oleh persepsi dan kepribadiannya, sedangkan persepsi dan kepribadian dilatarbelakangi oleh pengalamannya.

Kondisi lingkungan saat ini dapat disederhanakan dengan era globalisasi, dimana telah terjadi pertemuan dan gesekan nilai-nilai budaya, agama, dan berbagai nilai lainnya di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, transformasi dan informasi hasil modernisasi teknologi tersebut. Globalisasi di satu pihak dapat menjadi ancaman, di pihak lain dapat menjadi tantangan dan peluang. Menurut Azizi, (Azizi, A. Qodri, 2003: 6) “kompetisi” adalah kata kunci globalisasi, yakni kompetisi dalam menghadapi hukum rimba, ketika satu nilai budaya atau agama berbenturan dan bersaing dengan nilai budaya atau agama yang lain.

Globalisasi dengan hegemoni Barat dinilai

akan mengikis identitas lokal. Individualisasi ranah kehidupan dan reduksi relasi sosial ke lingkup yang lebih interpersonal sering membuat banyak orang merasakan kehampaan dalam hubungan sosial, seperti perasaan kesepian di tengah keramaian dan hingar bingar metropolitan. Pada titik dan ranah tertentu, kompleksitas kondisi sosial, ekonomi, budaya dan politik berpengaruh sangat signifikan terhadap kondisi psikologis seseorang. Individu yang berhaluan ideologi konservatif memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengendap sindrom dan keresahan terhadap efek dari perubahan sosial dan politik. Oleh karena itu, individu seperti itu akan lebih cenderung bertahan dengan mengidealisasikan romantisme masa silam. Perasaan seperti itu akan menekannya pada kekhawatiran dalam bentuk deprivasi atau ketertekanan.

Oleh karena itu, peserta didik yang tergolong remaja dan dari segi kejiwaan masih mudah dipengaruhi tersebut perlu dibentengi agar tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak baik, termasuk informasi tentang kekerasan, radikalisme, dan lain sebagainya. Masalah utama yang biasa dihadapi kaum muda yang notabene pewaris generasi sebelumnya pada masa mendatang pada umumnya merupakan masalah berkaitan dengan kebutuhan akan persiapan masa depannya. Masalah tersebut antara lain kebutuhan bio-fisiologik, kebutuhan sosio-psikik, kebutuhan ekonomik-finansial, kebutuhan yang berkaitan dengan dimensi kehidupan religius manusia. (Yusuf, Choirul Fuad, 2003: 46 dan 127) Selain kebutuhan yang berkaitan dengan persiapan masa depan, pemuda juga mempunyai masalah yang berkaitan dengan pencarian identitas diri.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam hal ini peserta didik adalah anak yang sedang belajar di sekolah lanjutan tingkat atas. Salah satu upaya penanggulangan intoleransi di kalangan peserta didik adalah dengan lebih memaksimalkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Pendidikan Agama Islam pada Sekolah adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata

pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 5 ayat (4) juga disebutkan bahwa pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. Dengan adanya Pendidikan Agama Islam pada Sekolah diharapkan dapat tercipta generasi yang beriman dan bertaqwa, dan berakhlak mulia yang dilandaskan pada nilai-nilai agama. Disamping itu, dengan memasukkan pendidikan agama ke dalam sekolah umum, diharapkan terdapat korelasi positif antara tujuan pendidikan nasional dengan pembentukan identitas beragama dan berbangsa serta terciptanya kerukunan hidup dan toleransi beragama di Indonesia.

Beberapa Riset Sebelumnya

Sampai saat ini telah dilakukan beberapa riset atau penelitian yang berkenaan dengan toleransi peserta didik pada khususnya, dan hubungan antar pemeluk agama di kalangan peserta didik pada umumnya.

Sebuah riset mendalam lebih awal dilakukan oleh Farha Ciciek (Peneliti dan Konsultan isu Pendidikan, Gender dan Transformasi Sosial). Penelitian dilakukan pada 2007 di 30 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Padang, Jakarta, Pandeglang, Cianjur, Cilacap, Yogyakarta dan Jember. Salah satu kesimpulannya adalah, kecuali Jember, kegiatan keagamaan SMU yang diteliti pada enam kota lainnya cenderung konservatif. Di antara penandanya adalah semakin merebaknya pandangan dunia yang absolut (di mana klaim kebenaran tunggal bagi kelompok sendiri), dan kecenderungan intoleransi kepada perbedaan (terutama kelompok/aliran agama yang berbeda). (Tim Peneliti: 2011: 3)

Berkenaan dengan toleransi, Yayasan LkiS, sebagaimana dikutip Salim, dkk. (Salim, Hairus dkk., 2011) juga pernah melakukan penelitian yang hasilnya antara lain adanya gejala intoleransi di kalangan peserta didik SMUN di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil survei yang dijarang dari 760 responden dari 20 SMU di DIY tersebut menunjukkan bahwa 6,4 % peserta didik memiliki pandangan yang rendah dalam hal toleransi, 69,2

% memiliki pandangan yang sedang, dan 24,3% yang memiliki tingkat toleransi beragama yang tinggi.

Pada tahun 2008, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) melakukan survei terhadap 500 guru agama Islam pada SMA dan SMK di Jawa. Salah satu hasilnya adalah bahwa mereka kurang mengajarkan toleransi beragama dan kebangsaan kepada murid. Sebaliknya, eksklusivisme agama dan pola konservatif cenderung dipertahankan. Hasil survei menunjukkan antara lain, 3 persen responden yang mengharapkan murid bersikap toleran. (Warta Kota, 2008)

Beberapa penelitian tersebut mengambil lokasi yang tidak cukup luas, hanya mengambil lokasi pada satu atau beberapa kota tertentu di sekitar di Pulau Jawa. Penelitian kali ini mengambil lokasi di beberapa sekolah dan madrasah di berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera yang dipilih secara acak.

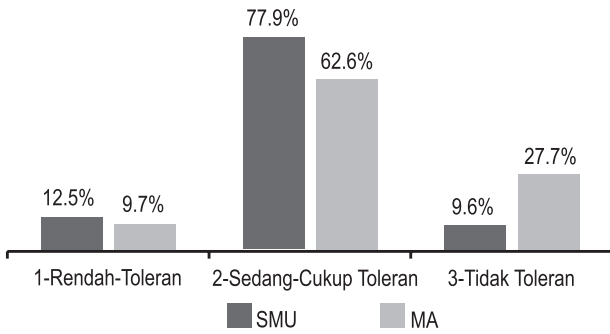
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini penulis sajikan hasil penelitian terhadap peserta didik mengenai adanya gejala intoleransi dalam kehidupan beragama. Setelah itu, dipaparkan pula variabel yang kemungkinan berpengaruh terhadap kondisi demikian. Variabel tersebut secara ringkas disederhanakan dalam variabel internal dan eksternal.

Variabel toleransi beragama diukur melalui sejumlah instrumen atau kuesener yang terdiri beberapa butir pernyataan/pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 71,7 % masuk dalam kategori cukup toleran, sebanyak 17,3 % masuk dalam kategori setuju terhadap tindakan intoleran, dan 11 % dalam kategori toleran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peserta didik SLTA dalam kondisi cukup toleran atau moderat. Namun, terdapat kecenderungan mengarah pada perilaku intoleran. (Ibid: 89).

Guna mendapatkan gambaran lebih luas terkait persetujuan pelajar muslim tentang perilaku intoleran menurut sebaran sekolah, maka dilakukan perbandingan berdasarkan satuan pendidikan dengan mengkomparasi antar jenis sekolah, yaitu: Sekolah SMU dan SMK dalam kategori sekolah 1 dan Madrasah Aliyah dalam kategori sekolah 2. Berikut disajikan grafik dari masing-masing sub kategori sekolah dimaksud:

Grafik Toleransi Beragama Peserta Didik Muslim Berdasarkan Kategori Sekolah (%)



Dari grafik di atas, diperoleh data lapangan berdasarkan kategori satuan pendidikan atau jenis sekolah SMU dan MA. Didapatkan perbandingan bahwasanya siswa SMU dan SMK berperilaku dalam kategori “sedang” atau cukup toleran dan cenderung mengarah ke rendah atau berperilaku toleran. Bandingkan dengan siswa Madrasah Aliyah (MA) yang secara umum termasuk dalam kategori “sedang” atau cukup toleran tetapi cenderung mengarah ke kategori atas atau berperilaku intoleran. Dengan bahasa lain dapat dikatakan bahwa pelajar MA cenderung berperilaku lebih intoleran dibanding pelajar SMU.

Tingkat toleransi peserta didik tersebut secara keseluruhan dikorelasikan dengan faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini, faktor internal difokuskan pada paham keagamaan. Adapun faktor eksternal difokuskan pada variabel deprivasi relatif, kesalehan, intensitas pendidikan agama di luar sekolah, atensi terhadap pendidikan agama di sekolah, dan keterlibatan peserta didik muslim dalam organisasi ormas fundamentalis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur hubungan antar variabel yang mempengaruhi perilaku intoleran peserta didik SLTA sebagian didukung oleh data empirik dan sebagian lainnya tidak didukung oleh data empirik. Sehingga berdasarkan fakta didapatkan temuan bahwasanya perilaku intoleran dipengaruhi secara langsung oleh paham keberagaman, deprivasi relatif kesalehan, intensitas pendidikan agama di luar sekolah, atensi terhadap pendidikan agama di sekolah, serta keterlibatan peserta didik muslim dalam organisasi ormas fundamentalis.

Terdapat pengaruh langsung yang positif dan signifikan paham keagamaan terhadap perilaku intoleran. Ini berarti jika upaya pengembangan paham Islam di lingkungan

sekolah mengarah semakin moderat, mengakibatkan perilaku toleran makin tumbuh kembang atau lebih baik. Sebaliknya jika upaya pengembangan paham keagamaan di lingkungan SLTA makin mengarah ke paham konservatif, maka mengakibatkan perilaku intoleran makin menguat.

Terdapat pengaruh langsung yang positif dan signifikan kondisi deprivasi relatif terhadap perilaku intoleran. Ini berarti jika suasana sosial politik dan keberagaman yang dirasakan dan diharapkan semakin membaik, mengakibatkan makin menguatnya perilaku toleran di kalangan peserta didik.

Terdapat pengaruh langsung yang positif dan signifikan tingkat kesalehan beragama di kalangan peserta didik terhadap perilaku intoleran. Ini berarti jika tingkat ketaatan beragama peserta didik semakin menguat, mengakibatkan makin menguatnya perilaku intoleran di kalangan peserta didik, demikian sebaliknya. Terdapat pengaruh langsung yang positif dan signifikan intensitas pendidikan agama di luar sekolah di kalangan peserta didik terhadap perilaku intoleran.

Oleh karena itu penanaman paham keagamaan yang moderat diperlukan agar selanjutnya lebih tercipta kehidupan beragama yang toleran. Ini juga berarti jika upaya intensifikasi pendidikan agama di luar sekolah makin sering diikuti, mengakibatkan makin menguatkan perilaku intoleran di kalangan peserta didik. Karena itu penting mengarahkan dan membimbing peserta didik SLTA mengikuti pendidikan agama di luar sekolah ke arah paham yang moderat.

Terdapat pengaruh langsung yang positif dan signifikan atensi pendidikan agama di sekolah terhadap perilaku intoleran. Ini berarti jika upaya pengembangan pendidikan agama di sekolah makin membaik, mengakibatkan makin menguatkan perilaku toleran di kalangan peserta didik.

Terdapat pengaruh langsung yang positif dan signifikan keterlibatan muslim dalam organisasi masyarakat yang berafiliasi gerakan Islam/fundamentalis terhadap perilaku intoleran. Ini berarti jika ormas Islam yang Islamis makin banyak diikuti atau tumbuh subur di lingkungan sekolah, mengakibatkan makin menguatnya perilaku intoleran di kalangan peserta didik muslim SLTA.

Terdapat pengaruh tidak langsung yang positif dan signifikan paham islamis melalui

tingkat kesalehan, kondisi kecewa terhadap sosial politik yang ada, atensi terhadap pendidikan agama (PA) sekolah, intensitas pendidikan agama luar sekolah dan keterlibatan dalam organisasi islamis terhadap perilaku intoleran. Ini berarti perilaku toleran dapat terdorong dengan peningkatan wawasan dan pemahaman Islam yang moderat, secara bersama-sama dengan upaya penciptaan suasana percaya (*trust*) terhadap kehidupan bermasyarakat ke depan yang makin membaik, upaya peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah, pengawasan dan pembimbingan pendidikan agama di luar sekolah dan pembinaan peserta didik muslim SLTA yang berafiliasi ormas Islamis.

Data ini juga menjelaskan bahwasanya perilaku intoleran, khususnya di kalangan Islam, diketahui tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal, seperti paham islamisme dan atau keterlibatannya dalam jaringan organisasi Islam, tetapi juga atensi peserta didik muslim terhadap pendidikan agama di sekolah, dan intensitas pendidikan agama di luar sekolah. Kedua variabel terakhir secara positif dan tidak konsisten mempengaruhi perilaku intoleran peserta didik muslim. Artinya, pengaruh pendidikan agama di sekolah bersifat tidak langsung terhadap perilaku intoleran. Pendidikan agama di sekolah dapat memberikan pengaruh secara positif terhadap perilaku intoleran ketika secara bersamaan peserta didik muslim tersebut juga memiliki paham islamisme yang kuat atau terlibat dalam organisasi islam radikal. Demikian pula terhadap variabel pendidikan agama di luar sekolah, yakni berkorelasi positif dan tidak konsisten.

Dengan demikian seorang peserta didik muslim yang islamis berkorelasi positif atau lebih dekat dengan keterlibatannya dalam organisasi fundamentalis/radikal. Sementara peserta didik muslim yang terlibat dalam organisasi non-keagamaan cenderung berpaham moderat. Karena itu keterlibatan dalam organisasi keagamaan radikal dan nonkeagamaan (intra dan ekstra sekolah) menjadi variabel bebas (*independent*) yang mempengaruhi paham keberagaman peserta didik sehingga ia menjadi toleran atau sebaliknya intoleran. Keterlibatan dalam organisasi nonkeagamaan (intra dan ekstra di sekolah) menjadi potensi pendorong pemahaman Islam yang terbuka yang selama ini terindikasi belum didukung kuat oleh orang tua peserta didik secara

positif. Pilihan berorganisasi utamanya yang intra dan ekstra (nonkeagamaan) di sekolah atau madrasah dipengaruhi kuat oleh karena alasan pilihan sendiri dari peserta didik yang bersangkutan.

Kekecewaan terhadap situasi –sosial-politik-keagamaan- saat ini yang dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya/diharapkan, ditengarai menjadi penyebab munculnya sikap intoleran. Survei ini menunjukkan kekecewaan dan persepsi bahwa situasi sosial-politik-keagamaan saat ini buruk ternyata berkorelasi positif namun tidak konsisten terhadap intoleransi. Hal tersebut berarti, meski deprivasi relatif/kekecewaan terhadap situasi saat ini dapat menumbuhkan sikap dan perilaku intoleran, namun dia tidak dapat memicu intoleransi jika hanya berdiri sendiri. Dibutuhkan variabel-variabel lain untuk memantik kekecewaan ini menjadi perilaku intoleran.

Dicermati dari hasil hubungan koefisiensi berbagai variabel yang diujikan dalam penelitian ini, terbukti variabel islamisme dan keterlibatan peserta didik dalam organisasi-organisasi berpaham islamis menjadi variabel penengah (*intervening*) yang sangat menentukan apakah nantinya peserta didik muslim berperilaku intoleran atau tidak. Bahwa pendidikan agama di dalam sekolah atau di luar sekolah, atau kekecewaan terhadap kondisi sosial politik keagamaan saat ini yang tidak sesuai harapan, atau tingkat kesalehan beribadah turut memberi pengaruh bagi peserta didik berperilaku intoleran, dikonfirmasi dalam penelitian ini, tetapi variabel-variabel tersebut bersifat tidak tetap. Menggunakan istilah lain, ketiga variabel terakhir adalah faktor penunggu, sedangkan variabel paham islamisme dan keterlibatan di organisasi-organisasi keagamaan berorientasi islamis adalah faktor pencetus.

UPAYA PENANGGULANGAN MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Isi/materi Pendidikan Agama yang moderat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mayoritas peserta didik dalam kategori moderat. Hanya 17,3 % yang tergolong intoleran. Walaupun jumlahnya masih kecil, akan tetapi gejala intoleransi tersebut patut diwaspadai agar tidak menjadi lebih besar lagi. Tetap diperlukan berbagai upaya untuk menang-

gurangi gejala intoleransi di kalangan peserta didik tersebut. Sektor pendidikan, khususnya pendidikan agama, sangat diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam membangun kehidupan masyarakat yang toleran, rukun, dan saling menghormati melalui pendidikan pada umumnya, dan pendidikan agama pada khususnya. Semuanya dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional, menetapkan delapan standar nasional pendidikan yang harus menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Delapan standar nasional pendidikan tersebut adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Mutu pendidikan nasional yang tercermin dalam kompetensi lulusan satuan-satuan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai komponen standar nasional pendidikan yang lain sebagaimana telah diuraikan di muka. Dalam tulisan kali ini, uraian tersebut difokuskan pada komponen-komponen yang terkait secara langsung dengan kurikulum pendidikan, yakni komponen standar isi/materi yang diajarkan, komponen standar proses pembelajaran (metodologi), dan standar penilaian yang juga harus ditingkatkan kualitasnya.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa paham keagamaan berpengaruh langsung dan positif terhadap perilaku intoleran dan toleran peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan paham keagamaan yang moderat di lingkungan sekolah, khususnya melalui pendidikan agama. Isi atau materi pelajaran difokuskan ke arah itu.

Membangun toleransi dan kesepahaman antarsesama memang selayaknya ditanamkan sejak dini lewat jalur pendidikan. Apalagi sekolah menjadi jenjang peralihan dari keluarga ke masyarakat. Ketersediaan kurikulum pendidikan agama yang menekankan nilai-nilai luhur keagamaan sebagai *software* dalam berinteraksi

membuat anak didik lebih siap menghadapi kehidupan yang majemuk.

Sekolah harus berperan ganda: tidak hanya mencerdaskan peserta didik lewat kegiatan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga wajib melakukan transfer nilai (*transfer value*) sebagai pedoman bergaul dan mendefinisikan diri dalam masyarakat. Idealnya, pendidikan agama lebih menekankan pada ajaran moral, seperti kasih sayang, tolong menolong, toleransi, tenggang rasa, menghormati perbedaan ras, menghormati eksistensi orang lain, dan sikap-sikap lain yang mendukung harmonis antarsesama. Bekal yang diperoleh dari sekolah yang menerapkan pendidikan tersebut akan jadi investasi sosial dalam bermasyarakat. Mereka tidak gampang diprovokasi karena dalam jiwanya telah tertanam nilai-nilai penghormatan terhadap kemajemukan. (Fauzi, Achmad, 2011: 6)

Pendidikan agama juga diarahkan untuk membentuk generasi yang mampu beradaptasi dan hidup dengan berbagai golongan yang berbeda, namun tetap tidak terlepas dari agamanya, akar budaya, dan jati dirinya, serta mampu hidup damai dalam masyarakat yang plural. Atau dengan istilah lain, dalam konteks Indonesia yang majemuk dari segi suku, agama, budaya, bahasa, kepentingan politik dan lain sebagainya, maka pendidikan agama seyogyanya juga berisikan materi pendidikan yang bernuansa atau berwawasan kerukunan. Di satu sisi, peserta didik sangat taat menjalankan agama yang dipeluknya, pada saat yang sama dapat menghargai agama dan pemeluk agama lainnya.

Pendidikan agama berwawasan kerukunan bertujuan untuk membangun keberagamaan siswa inklusif dan moderat serta mengeliminir jarak sosial antar peserta didik yang berbeda agama guna terciptanya persaudaraan yang sejati. (Soemanto dkk. 2008: 2). Pendidikan agama berwawasan kerukunan dimaknai sama dengan pendidikan multikultural. Kalimat multikultural menunjuk adanya fakta keragaman yang ada. Hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan guru Pendidikan Agama tentang multikulturalisme tergolong baik. Sikap dan respon mereka pun tergolong inklusif, yakni menerima sistem kepercayaan lain untuk eksis. (Habibullah, Ahmad dkk. 2008: 261 dan 267).

Sekolah merupakan lembaga yang cukup

strategis untuk menciptakan kondisi tersebut. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Bab II, Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Pendidikan Agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.

Dari sudut pandang Pendidikan Agama Islam di Sekolah, maka diperlukan materi yang menekankan Islam sebagai *rahmatan lil'alam* atau Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam dan isinya. Dalam perspektif ini, kepada peserta didik diajarkan bagaimana cara hidup, baik dalam internal kelompoknya maupun dalam eksternal kelompok lain. Mereka selalu bisa hidup damai dengan lingkungannya. Kepada peserta didik diajarkan bagaimana memaknai perbedaan yang dibingkai dalam bhinneka tunggal ika secara bijaksana dan tepat. Banyak ayat Al Qur'an dan Hadis yang menekankan adanya toleransi beragama.

Dalam Pendidikan Agama Islam, yang perlu mendapatkan perhatian adalah memberikan pengalaman pada anak-anak yang bervariasi itu untuk hidup dan bermain rukun satu sama yang lain.

Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, ras (etnik), dan golongan. Kemajemukan masyarakat adalah sebuah kodrat alamiah dan merupakan sunnatullah yang harus disyukuri. Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku, ras, bangsa, budaya, dan bahasa. Berbagai kemajemukan tersebut digunakan untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain.

Di Madinah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kehidupan yang majemuk dimana hidup tiga penganut agama yakni orang-orang Islam, Nasrani, dan Yahudi. Rasulullah telah membangun umat di tengah heterogenitas masyarakat Madinah dan mampu menciptakan harmoni dalam keragaman. Nabi mengikat kerukunan dan toleransi di antara penganut ketiga agama serta suku-suku yang ada dengan tali perjanjian yang menjadi kesepakatan bersama, yang dikenal dengan Piagam Madinah.

Dari sinilah kemudian lahir kehidupan masyarakat yang berkeadaban tinggi dan menjadi

contoh model bangunan masyarakat yang pluralistik. Rasulullah memberikan contoh hidup damai dan penuh toleransi dalam lingkungan yang plural. Ketika menaklukkan Makkah, beliau menjamin kepada setiap orang, termasuk musuh yang ditaklukkannya, agar tetap merasa nyaman dan aman.

Nilai-nilai ke-Islam-an yang demikian dikaitkan dan diintegrasikan dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an, sehingga diharapkan siswa lebih mampu untuk memahami dan toleran terhadap pandangan dan realitas yang berbeda.

Dari segi materi, sesuai dengan rencana Kemendikbud untuk memberlakukan Kurikulum 2013, maka direncanakan Pendidikan Agama dan budi pekerti akan mendapatkan alokasi waktu empat jam pelajaran pada jenjang tertentu setiap minggunya. Hal ini harus diartikan sebagai pengorientasian pelajaran agama kepada pengembangan budi pekerti atau akhlak. Dalam ajaran Islam, sangat banyak ayat Al Qur'an dan Hadis yang menunjukkan bahwa pendidikan akhlak adalah pendidikan yang terpenting. Orientasi ini mengandung arti bahwa agama dan budi pekerti diorientasikan kepada akhlak yang mulia, dan kepada pendidikan manusia-manusia yang penuh kasih sayang, yang berakhlak dengan akhlak Allah dan RasulNya. Penambahan pelajaran tersebut jangan sampai dipenuhi semata-mata dengan kisah-kisah peperangan dan ketegangan yang justru dapat menyalahpahaman pemahaman siswa. Atau justru diisi dengan pelajaran tatacara beribadah legal-formalistik dan bersifat hafalan kosong dari makna batinnya sebagai dasar pengembangan akhlak mulia. Penambahan jam mata pelajaran tersebut hendaknya diisi dengan praktik-praktik konkret di tengah masyarakat dan bukan hanya teori-teori yang bersifat kognitif belaka. Membantu orang lemah misalnya, justru akan lebih menyentuh aspek afektif dan psikomotorik, sehingga lebih memungkinkan mata pelajaran tersebut menacapai tujuan. (Bagir, Haidar. 2013: 4).

Peningkatan Profesionalitas Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen antara lain disebutkan bahwa guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional bidang pendidikan. Dalam proses pendidikan pada umumnya dan proses

pembelajaran di sekolah pada khususnya, peranan guru sangat penting. Guru merupakan komponen yang sangat mempengaruhi proses pendidikan dan merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar. (Sanjaya, Wina, 2012: 13).

Guru yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Prinsip profesionalitas tersebut, antara lain guru memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, idealisme, komitmen untuk meningkatkan pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan tersebut, guru perlu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Di samping itu guru juga harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebaik apapun kurikulum pendidikan tidak akan berarti apa-apa jika guru sebagai ujung tombak pendidikan dan pengajaran tidak memiliki basis kompetensi yang solid dan memadai yang memiliki gambaran sosok guru yang kritis, kreatif, dan inovatif.

Peran guru pendidikan agama, termasuk guru pendidikan agama Islam (GPAI) juga penting. Untuk dapat melaksanakannya, diperlukan GPAI yang profesional dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi GPAI hendaknya selalu terus diupayakan yang dimulai dengan menelusuri aspek yang paling rendah atau kecil tingkat kompetensinya. Sebab guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar. Bagaimanapun bagus dan idealnya kurikulum pendidikan, bagaimanapun lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan, tanpa diimbangi dengan kemampuan guru dalam mengimplementasikannya, maka semuanya akan kurang bermakna.

Sejumlah realitas kondisi guru saat ini menunjukkan bahwa kondisi guru belum sampai pada tingkat yang ideal, termasuk guru Pendidikan Agama pada Sekolah. Berbagai informasi berikudapat dijadikan salah satu bahan untuk peningkatan profesionalitas guru.

Pada bulan Februari tahun 2012 yang lalu, Kemendikbud telah melakukan Uji Awal Kompetensi (UKA) Guru di seluruh Indonesia untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. UKA tersebut mengikutsertakan sebanyak 281.016 Guru. Prof DR. Suyanto, Plt Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud dan Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, mengemukakan bahwa rata-rata hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) adalah 42,50 dari nilai tertinggi 100. Ini berarti bahwa secara umum kompetensi guru untuk semua jenjang pendidikan memang belum berada pada penguasaan kompetensi yang ideal. Menurut beliau, walaupun hasil tersebut membuat kita masygul, tetapi tidak boleh putus asa dan meningkatkan komitmen untuk belajar sepanjang masa. (Suyanto, 2012: 36 – 37).

Terkait dengan sertifikasi, maka hasil penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa sertifikasi portofolio berdampak positif hanya pada perbaikan ekonomi guru dan peningkatan minat menjadi guru. Adapun kinerja guru dan prestasi belajar murid, tak ada efek perbaikan signifikan. (Abduhzen, Mohammad, 2013: 6).

Terkait dengan guru pendidikan Agama Islam, telah dilakukan beberapa penelitian tentang kompetensi GPAI, baik secara khusus maupun bagian dari penelitian yang lebih luas. Hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan memperlihatkan bahwa tingkat ketertarikan atau ke-suka-an siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama pada Sekolah masih tinggi. Sebanyak 61,9 % siswa menyatakan suka dan 30,9 % sangat suka. Alasan suka terhadapnya adalah sebanyak 62,7 % karena faktor agama sangat penting bagi kehidupan, sebanyak 28,1 % karena faktor agama wajib dipelajari, serta sebanyak 4,8 % cara mengajarkan guru yang menyenangkan dan faktor lainnya sebanyak 4,4 %. (Qowaid, dkk., 2003: 81 – 82. Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya kesadaran siswa akan pentingnya pendidikan agama di sekolah. Namun data tersebut juga memperlihatkan adanya sebagian kecil siswa (responden), yakni hanya 4,8%, yang menjawab suka pada pendidikan agama di sekolah karena faktor cara mengajar yang dianggapnya menyenangkan.

Hal demikian tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian tentang kompetensi guru pendidikan agama Islam di berbagai daerah yang dilakukan

beberapa tahun sebelumnya. Penelitian tentang profil kompetensi guru pendidikan agama Islam pada SMA di berbagai daerah menunjukkan bahwa nilai rata-rata pengetahuan pengelolaan proses belajar mengajar (PBM) dan pengetahuan pengukuran dan evaluasi (PE) dalam kategori kurang. Adapun penguasaan materi pelajaran PAI, kompetensi individual dan sosial GPAI SMA dalam kategori baik. Artinya, kelemahan atau kekurangan utama GPAI adalah dalam aspek pengelolaan proses belajar mengajar dan evaluasinya, termasuk di dalam metodenya. Kondisi yang hampir sama juga diperoleh dari hasil penelitian tentang kompetensi GPAI pada SMP.

Hal itu dapat berimplikasi pada kurang maksimalnya pembelajaran. Selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan GPAI dalam membentuk anak didik sesuai prinsip dan tujuan pembelajaran Agama Islam pada sekolah. Bahkan tidak menutup kemungkinan para siswa lebih tertarik menerima pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah bukan dari GPAI mereka, tetapi berasal dari orang lain yang isinya berupa nilai-nilai yang tidak sejalan dengan tujuan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

Kalaupun peserta didik memperoleh Pendidikan Agama Islam dari luar sekolah, dan hal ini pada dasarnya suatu keniscayaan, maka peserta didik yang bersangkutan diharapkan dapat menyaring antara informasi yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang tidak benar. Dalam kondisi demikian, guru, termasuk GPAI, tetap dituntut untuk berperan secara aktif. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai sumber belajar, tetapi juga berperan sebagai orang yang membimbing dan memfasilitasi agar siswa mau dan mampu belajar dan memperoleh ilmu secara benar.

Dengan demikian, kekurangan guru Pendidikan Agama adalah aspek metode pembelajaran dan evaluasinya. Maka salah satu aspek utama yang perlu ditingkatkan agar pendidikan agama Islam di sekolah lebih baik adalah dengan meningkatkan kualitas metode pembelajaran guru kepada siswanya. Dengan metodologi pembelajaran yang menarik, maka diharapkan siswa akan memperoleh pendidikan agama Islam dari guru mereka sendiri yang memang materinya telah dirancang untuk tujuan tertentu sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia.

Di samping itu, peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam tersebut, khusus-

nya pada aspek metodologi pembelajaran, bukan hanya dengan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi dapat dilakukan dengan mendinamisasi Kelompok Kerja Guru maupun dengan pelatihan atau *in-service training*. Dinamisasi kelompok Kerja Guru (KKG) ternyata memiliki peran dalam peningkatan profesionalitas guru, walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkatnya masih rendah. (Qowaid dkk., 2008: 223).

Lamanya atau jumlah pelajaran yang diberikan untuk meningkatkan kompetensi guru, termasuk guru Pendidikan Agama, tergantung kebutuhan. Mungkin hanya dilaksanakan dalam puluhan jam saja, mungkin lebih dari itu. Jadi bisa saja diklat tersebut dilaksanakan dalam dua semester, satu semester, atau lebih rendah dari itu.

Disamping meningkatkan kualitas metode pembelajaran juga perlu ditingkatkan kualitasnya dengan melengkapi sarana pembelajaran agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sarana tersebut mencakup perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara Standar Nasional Pendidikan yang terasa masih kurang adalah aspek sarana, khususnya media untuk memera-gakan materi pelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa dan situasi mutakhir. (Aziz, Abdul Al Bone dkk., 2006: 55- 56). Sarana tersebut bukan saja berupa perangkat keras dan lunak yang terkait dengan teknologi informasi untuk wilayah yang telah memungkinkan, akan tetapi juga berupa pemanfaatan sumber daya lokal yang bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran Pendidikan Agama Islam di wilayah terpencil misalnya.

Sebab, mengutip salah satu prinsip pendidikan agama, maka hendaknya pendidikan agama Islam di sekolah hendaknya dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk sukses hidup. Dengan demikian diharapkan melalui peningkatan kompetensi guru dan sarana pembelajaran tujuan pembelajaran sebagaimana dimaksud akan semakin tercapai.

Perlu dicermati pula apabila proses pendidi-

kan hanya menyangkut sisi formal dari upaya persiapan seseorang menjadi guru, termasuk guru Pendidikan Agama Islam, dengan meningkatkan kompetensi mereka melalui berbagai macam pendidikan dan pelatihan. Di samping itu mereka juga diupayakan dengan aneka insentif, khususnya tunjangan profesi guru. Upaya-upaya tersebut harus diapresiasi karena memang hal itu sungguh penting. Akan tetapi masih ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya dimiliki oleh seorang guru agar menjadi guru yang “betul-betul guru”. Aspek itu adalah motivasi. (Sugiono, 2013: 74)

Seseorang yang secara formal menjalani profesi guru diharapkan telah memiliki landasan motivasi (jiwa) yang kokoh dalam menerima profesinya bukan sekedar sebagai pekerjaan, tetapi sebagai panggilan hidup. Dengan nyala api semangat yang menginspirasi kebaikan bagi murid-murid dan orang lain. Upaya Pemerintah untuk menumbuhkan motivasi guru dan calon-calon guru melalui aneka skema insentif, khususnya berupa tunjangan profesi tersebut barulah menyentuh apa yang dipahami sebagai motivasi eksternal, meskipun penting. Guru mestinya mampu menumbuhkan di dalam dirinya motivasi internal atas panggilan profesinya. Idealisme tentang pendidikan sebagai proses pemerdekaan hanya mungkin terwujud jika guru-guru bermotivasi kuat menjalankan tugas, fungsi dan perannya.

Tidak kalah pentingnya adalah menciptakan budaya sekolah mendukung ke arah meningkatnya mutu pendidikan pada umumnya dan mutu pendidikan agama pada khususnya. Budaya sekolah adalah kualitas kehidupan sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai tertentu yang dikembangkan sekolah. Masing-masing sekolah telah memiliki visi dan misi yang harus dicapai atau dikembangkan. Disamping itu, berbagai landasan pendidikan yang mengacu pada sejumlah Undang-Undang dan Peraturan, juga merupakan budaya yang mesti diberlakukan dan dicapai oleh sekolah. Hasil penelitian tentang hubungan antara budaya sekolah dengan motivasi dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa. Terdapat hubungan positif antara keduanya. (Suprpto dkk., 2008: 137).

Dalam konteks yang lebih luas, terhadap guru Pendidikan Agama di Sekolah, sampai saat

ini masih dijumpai sejumlah kritik tentang pelaksanaan Pendidikan Agama di sekolah, termasuk aspek gurunya. Masih terdapat sejumlah kritik terhadap pembelajaran Pendidikan Agama itu sendiri. Berbagai kelompok masyarakat menyoroti atau mengkritik implementasi Pendidikan Agama di sekolah dan implikasinya pada kehidupan sosial di sekitarnya. Pendidikan Agama di sekolah-sekolah kita masih belum maksimal, dalam mencapai tujuan pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama pada khususnya.

Bahkan pernah ada yang mengusulkan agar pendidikan agama di sekolah ditinjau kembali. Sebab bila ditinjau dari sejarahnya, keberadaan pelajaran Agama di sekolah lebih ditopang oleh alasan politis. Agama lebih banyak dipakai terutama sebagai identitas politis. Hubungan antarumat beragama pun cenderung rentan konflik. Sementara nilai-nilai dasar agama, seperti keadilan, kejujuran, kesederajatan, tanggung jawab, saling menghargai sesama, sering *ketelingsut*. Sejauh ini ia lebih banyak menjadi beban akademis dan anggaran. Manfaat substansialnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. (Munjid, Ahmad. 2013).

Sistem Penilaian

Peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Sekolah juga dapat dilakukan dengan sistem penilaian hasil belajar yang tepat dan sesuai dengan hakikat Pendidikan Agama Islam itu sendiri. Penilaian disini diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pendidikan Agama Islam sangat kental nuansa afeksi dan psikomotoriknya, di samping nuansa kognitifnya. Oleh karena itu, penilaian hasil pembelajarannya mestilah dipilih cara yang lebih tepat dalam mengukur tingkat keberhasilannya.

Selama ini bentuk penilaian seperti ulangan, tes, dan dalam konteks yang lebih luas evaluasi, lebih menonjol dilakukan dalam bentuk pilihan ganda, pilihan jawaban benar-salah, yang menghasilkan jawaban baku. Cara ini hanya akan dapat mengembangkan kemampuan berpikir rendah. Penonjolan evaluasi Pendidikan Agama Islam yang seperti tampaknya kurang tepat.

Hal ini tidak memberikan peluang bagi siswa

untuk bersikap fleksibel terhadap keragaman pendapat dan adanya wilayah yang bukan hanya hitam-putih dalam dunia nyata. Akibatnya siswa terbiasa berpikir hitam-putih, tidak mampu berpikir alternatif/berbeda. Ini dapat berakibat pada kehidupan masyarakat yang tidak toleran terhadap perbedaan, merasa diri/kelompok paling benar yang kerap kali memicu konflik adalah gambaran dari cara berpikir seperti ini. Sekolah meningkatkan daya kritis, kreatif, dan juga logika dalam proses pembelajaran. Kalau memang daya kritis dan juga kreativitas diutamakan, maka soal-soal atau evaluasi terhadap peserta didik pun perlu soal yang memungkinkan siswa berpikir kritis dan analisis. Maka model soal esei harus tetap diberikan dengan porsi yang cukup. (Megawangi,Ratna, 2013: 17)

Dalam aspek sejarah atau tarikh Islam misalnya, siswa di samping mampu mengingat tahun perangnya, juga harus mengerti konteksnya, apalagi menganalisis mengapa perang bisa terjadi dan apa implikasinya, serta mampu memahami apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap tahanan perang, pada peristiwa perang Badar misalnya.

Perlu dipikirkan kembali agar penilaian Pendidikan Agama Islam di Sekolah lebih banyak dilakukan dalam bentuk uraian dan pemantauan terhadap perilaku keseharian peserta didik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 64 ayat (3) menyebutkan bahwa penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dilakukan dengan dua cara, yakni pertama, melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; dan kedua, melalui ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

Puslitbang Pendidikan Agama telah membuat Model Evaluasi Pendidikan Agama Islam Aspek Afeksi dan Psikomotor Untuk Sekolah Dasar Kelas 1 – 6. (Bahari dkk. 2011: 4 - 5) Diantara petunjuk teknis Modul tersebut adalah:

1. Guru melakukan observasi terhadap perilaku atau tindakan siswa sesuai kompetensi intinya;
2. Obsevasi dilakukan berulang-ulang sampai ditemukan polanya;
3. Guru memberikan catatan/komentar terhadap

peristiwa yang melatarbelakangi, kemudian guru mensikapinya dan menindaklanjutinya;

4. Guru memberikan sekor sesuai perilaku siswa.

Dalam melakukan penilaian pada khususnya dan peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam pada umumnya, maka perlu dilibatkan jajaran Pengawas Pendidikan

Agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pengawas melalui peningkatan kegiatan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) menjadi meningkat. (Habibullah, Ahmad, dkk.,2008: 117). Hal ini berimbas pada peningkatan kinerja Guru Pendidikan Agama Islam dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik.

PENUTUP

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan munculnya kecenderungan gejala sikap keberagaman intoleran peserta didik Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, walaupun secara umum sikap mereka adalah moderat dan cukup toleran. Hal tersebut terlihat dari data pengelompokan distribusi skor variabel toleransi dengan kecenderungan yang mengarah pada sikap intoleran.

Gejala intoleransi peserta didik berkorelasi dengan berbagai variabel, baik internal agama maupun eksternal lingkungannya. Dari berbagai variabel yang ada, maka paham keagamaan memiliki korelasi yang positif dan signifikan dengan intoleransi.

Untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi gejala intoleran tersebut diajukan beberapa saran. Di antaranya melakukan penguatan isi/materi pendidikan agama yang moderat yang mengedepankan aspek kerukunan. Dalam konteks agama Islam, penerapannya, hendaknya isi/materi pendidikan agama diorientasikan kepada aspek akhlak mulia dengan meletakkan Islam *Rahmatan Lil'alam* sebagai salah satu intinya. Isi/materi tersebut dapat dimasukkan dalam proses belajar mengajar (PBM) di kelas atau dilaksanakan di luar kelas.

Agar terjadi kesinambungan antara pengembangan pendidikan agama di sekolah yang moderat dan toleran dengan pendidikan agama di luar sekolah, maka dipandang penting melakukan optimalisasi peran komite sekolah/madrasah, OSIS di bawah bimbingan yang

maksimal dari guru Pendidikan Agama,serta membangun komunikasi yang intens dengan persatuan orang tua peserta didik dan organisasi kepemudaan dan keagamaan yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dengan kehidupan toleran.Guru Pendidikan Agama dan para peserta didiknya secara berkala mengadakan komunikasi, khususnya kunjungan, ke sekolah, organisasi, lembaga, tokoh yang berbeda agama untuk saling mengenal di antara mereka.

Di samping itu, peningkatan profesionalitas guru pendidikan agama hendaknya lebih ditekankan dengan melihat aspek yang paling menonjol tingkat kekurangan mereka. Salah satu aspek penting yang menjadi kekurangan pada guru pendidikan agama adalah metodologi pembelajaran dan evaluasinya, serta materi yang lebih berorientasi pada aspek afektif dan psikomotorik, bukan pada kognitif semata.

Dalam pengajarannya hendaknya lebih diperkaya dengan praktik-praktik yang kongkrit

terjadi di masyarakat agar lebih menyentuh aspek afektif dan psikomotorik siswa.Dalam hal ini, pembelajaran yang *up to date* sangat diperlukan seperti penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Guru dilatih agar terampil memanfaatkan sarana tersebut.

Tidak kalah pentingnya dalam aspek penilaian pembelajaran dan motivasi guru pendidikan Agama Islam. Dalam hal penilaian, seperti ulangan, tes, atau ujian, hendaknya ditekankan pada bentuk uraian/esei dari pada bentuk pilhan ganda. Perilaku akhlak mulia sehari-hari peserta didik juga perlu diutamakan dalam penilaian tersebut.

Akhirnya, di samping aspek-aspek luar (ekstrinsik) guru, juga perlu ditekankan aspek instrinsik mereka. Dalam hal ini motivasi untuk menjadi guru pendidikan Agama Islam sangat penting untuk diperhatikan. Sehingga diharapkan, seorang guru Pendidikan Agama Islam dalam mengajar memiliki komitmen yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduhzen, Mohammad. 2013. "Implementasi Pendidikan." *Kompas*. 6 Maret 2013.
- Aziz, Abdul Al Bone dkk., 2006. *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Agama di Sekolah Dasar dalam Rangka Pencapaian Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Azizy, A. Qodri. 2003. *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Siswa.
- Bahari dkk. 2011. *Model Evaluasi Pendidikan Agama Islam Aspek Afeksi Dan Psikomotor Untuk Sekolah Dasar*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Djumiko.2010. "Hubungan Timbal Balik antara Penghuni dengan Lingkungannya". *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Surakarta*. Vol 8. Desember 2010. (12 A).
- Fauzi, Achmad. 2011. "Revitalisasi Pendidikan Agama". *Kompas*, 22 Februari 2011.
- Hasani, Ismail dkk. 2011. *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat*. Jakarta: SETARA Institute.
- Habibullah, Ahmad dkk. dalam Ed. Choirul Fuad Yusuf dkk. 2008. *Efektifitas Pokjawas Dan kinerja Pengawas*. Jakarta: Pena Cit-tasatria.
- Habibullah, Ahmad dkk. dalam Ed. Choirul Fuad Yusuf dkk. 2008. *Pemahaman Nilai-nilai Multikultural di Kalangan Guru Pendidikan Agama di Sekolah*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Hisyam, Muhammad et. al. 2006. *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Rentan Konflik*. Jakarta: LIPI.
- Hornby, AS. 1996. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford University Press. London.
- Kholid, AS Moh. 2013. "Menggalakkan (lagi) Pendidikan Toleransi". *Media Indonesia*, 14 Januari 2013.
- Kompas.2011. 27 Mei 2011.

- Kompas. 2013. "Indonesia Atasi Masalah Intoleransi". 1 Juni 2013.
- Megawangi, Ratna. 2013. "Tantangan Besar Pendidikan Kita". dalam. (Ed). A. Ferry T. Indratno. *Menyambut Kurikulum 2013*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku, h. 15 – 20.
- Munjid, Ahmad. 2013. "Status Pelajaran Agama di Sekolah Umum". dalam *Kompas* 26 Maret 2013.
- Qowaid, dkk. 2003. *Profil Guru Pendidikan Agama di Sekolah Umum*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Qowaid dkk., 2008. *Dinamika Kelompok Kerja Guru*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Salim HS, Hairus, dkk. 2011. *Politik Ruang Publik Sekolah, Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta*. CRCS: Yogyakarta.
- Salim HS, Hairus, Kailani, Najib and Azekiah, Nikmal. 2011. *The Politics of School's Public Space: Negotiation and Resistance in Public High Schools in Yogyakarta (Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta)*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies Universitas Gajah Mada.
- Sanjaya. Wina. 2012. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- "Seputar Indonesia". <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/category-table/1091-radikalisme-islam-menyusup-ke-smu.html>
- Soemanto dkk. 2008. *Eksperimen Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan*. Ed. Choirul Fuad Yusuf. Jakarta: PT Pena Citasatria.
- Soemanto dkk. dalam Ed Choirul Fuad Yusuf. 2008. *Pendidikan Agama berwawasan Kerukunan*. Jakarta: Pena Citasatria.
- Suprpto dkk., dalam Ed. Choirul Fuad Yusuf. 2008. *Budaya Sekolah & Mutu Pendidikan*. Jakarta: Pena Citastria.
- Suyanto. 2012. UKA dan Mutu Guru Kita. Dalam *Majalah Gatra* 4 April 2012. Jakarta.
- Suwignyo, Agus. 2013. "Guru Dulu, Baru yang Lain-lain." dalam. (Ed). A. Ferry T. Indratno. *Menyambut Kurikulum 2013*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku, h.73 – 80.
- Tim Peneliti. 2011. *Studi Perilaku Keberagamaan Siswa SMA, SMK dan Madrasah Aliyah (MA) di Pulau Jawa dan Sulawesi*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat. Jakarta: Gramedia.
- "Toleransi Jadi Tantangan". *Kompas*. 6 Juni 2011.
- Warta Kota*. 2008. "Guru Agama Eksklusif". 26 November 2008.
- Yusuf, Choirul Fuad. 2003. "Dinamika Pemuda Indonesia: Realitas dan Tantangan Masa Depan". Dalam Fadhal AR Bafadal. *Pemuda dan Pergumulan Nilai pada Era Global*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan.

A

Aam S. Rusydiana & Abrista Devi

Staf pengajar dan peneliti pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia. Email: tasik_pisan@yahoo.com. Pengajar pada Universitas Ibn Khaldun (UIK) Bogor. Juga sebagai konsultan riset pada SMART Consulting.

“MENCARI SOLUSI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 107

Abdul Aziz

“NON-STATE: ASPEK YANG TERLUPAKAN DALAM TEORI GERAKAN SOSIAL”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 121

Ahmad Ali MD

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Barat Cirendeu Ciputat Banten, Email; alimd3708@gmail.com

“ARGUMEN FORMALISASI HUKUM EKONOMI SYARIAH ”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 59

Ahmad Dumyathi Bashori

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Email: dimyathi70@gmail.com

“KONSEP MODERAT YUSUF QARDHAWI: TOLOK UKUR MODERASI DAN PEMAHAMAN TERHADAP NASH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 1

Ali Rama dan Makhlan

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Anggota Konsorsium Ekonomi Islam, E-mail: rama_clb_ku@yahoo.com & makhlanKEI@yahoo.com

“PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 31

Ali Romdhoni, MA

Peneliti dan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah Pati Jawa Tengah), Email: ali_romdhoni@yahoo.com

“ISLAM BERBUNGKUS KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM): MENEMUKAN NILAI-NILAI AJARAN ISLAM DALAM SENI KETOPRAK DI PATI JAWA TENGAH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 47

A. Zaenurrosyid

Dosen STAI Matholiul Falah Pati dan Mahasiswa Program Doktoral Islamic Law IAIN Walisongo), Email : guns_rosyid@yahoo.com

“WAKAF TUNAI (STUDI ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF DI PPPA DAARUL QURAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004)”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 19

N

Nihayatul Wafiroh

Alumnae of University of Hawaii at Manoa Honolulu, Email: ninikwafiroh@gmail.com

“MUSLIMS’ VIEWS OF HINDU RELIGIOUS LIFE: (A CASE STUDY OF BANYUWANGI MUSLIMS IN BALI)”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 99

Q

Qowaid

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta pusat

“GEJALA INTOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN PESERTA DIDIK DAN UPAYA ENANGGULANGANNYA MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 71

S

Suprpto

Peneliti pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Email: suprpto.litbang@yahoo.com

“MODEL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ALTERNATIF: SD ISLAM TERPADU NURUL FIKRI DEPOK JAWA BARATA”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 87

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago

Contoh:

Buku (monograf)

Kuntowijoyo.1998. *Paradigma Islam, Intre-pretasi untuk Aksi*. Mizan: Ban-dung.

Artikel (Jurnal)

Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting roles and synthetic women in Star Trex: The Next Generation. *Studies in Popular Culture* 13(2): 53:65.

Situs web

Lynch, Tim. 1996. Review of DS 9 trials and tribble-ations. Psi-Phi: Bradley's Science Fiction Club. [Http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html](http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html) (accessed October 8, 1997).

7. Transliterasi berpedoman pada pedoman transliterasi Library of Congress,
8. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
9. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
10. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Dr. H. Susari, M.A. (Redaktur Eksekutif)

HP: 0821 141 70501

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

soesary@yahoo.com

